

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN
PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022)**

Hafas Muzai *
Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N**
Dr. Marlina, S.H.M.Hum***

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh penegak hukum, juga terhadap pelaku telah banyak pula yang dijatuhi putusan pengadilan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan termasuk penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota TNI.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI pelaku tindak pidana narkotika, bagaimana penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika, bagaimana pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana pemecatan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika.

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada undang-undang. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022 pada dasarnya merupakan suatu tindakan penjeratan sebagai upaya memberikan pembelajaran bagi anggota TNI untuk taat dan patuh terhadap aturan dan menghindari dari segala perbuatan yang dilarang karena pertanggungjawaban tersebut akan selalu melekat pada diri anggota TNI. Anggota oknum TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pidana pokok berupa penjara selama selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) serta pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq.TNI AL. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022 dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI adalah perbuatan terdakwa mencerminkan sifat terdakwa yang tidak baik dan tidak patuh lagi terhadap aturan hukum yang berlaku, dengan tidak lagi meperdulikan kepentingan dan nama baik kesatuannya, meskipun terdakwa sudah mengetahuinya serta perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat serta bertentangan dengan Program pemerintah untuk memerangi peredaran gelap narkotika

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Prajurit TNI, Narkotika

* Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**.LEGAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ADDITIONAL
CRIMINAL SANCTIONS DISCLOSURE OF TNI SOLDIERS
WHO COMMITTED DRUG CRIMINAL OFFENCES**
(Study of Military Court Decision I-02 Number 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022)

Hafas Muzai *
Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N**
Dr. Marlina, S.H.M.Hum***

ABSTRACT

Law enforcement against narcotics crimes has been widely carried out by law enforcers, also many perpetrators have been sentenced to court decisions and are serving sentences in correctional institutions, including abuse of narcotics by unscrupulous members of the TNI.

The formulation of the problem in this thesis is how to regulate narcotics abuse in Indonesia, what are the accountability of TNI soldiers who commit narcotics abuse, what are the legal considerations of judges in the abuse of narcotics by TNI soldiers based on Decision P Number 109-K/PM.I-02/AL/XI/ 2022.

This type of research is normative juridical, namely research based on law. Data analysis was carried out qualitatively, namely a form of analysis that does not rely on numbers but on sentences.

The results of the study show that criminal law arrangements for narcotics abuse are regulated in RI Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. Criminal liability for members of the TNI who commit criminal acts of drug abuse in the decision of the Medan Military Court I-02 Number 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022 is basically an act of deterrence as an effort to provide learning for members of the TNI to obey and comply with the rules and avoid all actions that are prohibited because this responsibility will always be attached to members of the TNI. Members of the TNI who commit criminal acts of narcotics abuse with the principal punishment being imprisonment for 6 (six) years and a fine of Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah) as well as additional punishment being dismissed from Military service Cq.TNI AL. The judge's legal considerations in the decision of the Medan Military Court I-02 Number 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022 in the criminal act of narcotics abuse committed by unscrupulous members of the TNI is that the defendant's actions reflect the nature of the defendant who is not good and disobedient again against the rule of law in force, by no longer caring about the interests and good name of the unit, even though the defendant already knew about it and the defendant's actions were troubling and detrimental to society and contrary to the government's program to combat the illicit trafficking of narcotics

Keywords: Implementation of sanctions, TNI Soldiers, Narcotics

**Student of Law Program, Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of Law Program, Islamic University of North Sumatra*

***Supervisor II of Law Program, Islamic University of North Sumatra.*